

ULAMA DAN ULEE BALANG: POTRET REVOLUSI SOSIAL DI ACEH TAHUN 1945-1946

Heryati, S.Pd., M.Hum.

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Palembang

heryanti103@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Ulama dan *Ulee Balang*: Revolusi Sosial di Aceh Tahun 1945-1946”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis. Metode historis adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan pada masa lampau untuk mencari fakta yang kuat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan perjuangan rakyat Aceh dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan, dan untuk mengetahui latar belakang peristiwa Cumbok sehingga menjadi suatu revolusi sosial di Aceh. Dengan terjalinnya kembali persatuan dan kesatuan antara kaum *Ulee Balang* dan kaum Ulama di Aceh, dapat mengusir penjajahan serta dapat menduduki jabatan dalam pemerintahan. Hal tersebut merupakan tonggak dari sejarah baru berdirinya negara Republik Indonesia, yang terlepas dari segala penjajahan atau segala bentuk ikatan yang timbul dari kolonialisme asing di Indonesia.

Kata kunci: Ulama, *Ulee Balang*, Revolusi Sosial, Aceh

Abstract

This study entitled " Ulama and Ulee Balang: Portrait of a social revolution in Aceh in 1945-1946". In this study the authors used historical method. The historical method is the process of critically examine and analyze the records and relics of the past to find the fact that strong. The purpose of this research is to investigate the activities of the Acehnese struggle in defense of the proclamation of independence, and to determine the background Cumbok Incidence marked so that it becomes a social revolution in Aceh. With the re- establishment of unity between the Ulee Balang and the Ulama in Aceh, can expel the occupation and can occupy positions in government. This is a new milestone in the history of the founding of the Republic of Indonesia, apart from any occupation or any form of bond arising from foreign colonialism in Indonesia.

Keywords: *Ulama, Ulee Balang, Social Revolution, Aceh.*

PENDAHULUAN

Setelah beratus-ratus tahun lamanya bangsa Indonesia berjuang untuk membebaskan diri dari berbagai penjajahan, akhirnya kemerdekaan itu diperoleh pada tanggal 17 Agustus 1945 tepatnya tiga hari setelah Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Proklamasi Indonesia adalah: Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 12.00 (waktu Tokyo) atau jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Teks proklamasi dibacakan oleh Ir. Soekarno dengan didampingi oleh Drs. Moehammad Hatta ditempat kediamannya, Jl. Pegangsaan Timur No.56 Jakarta. Dengan proklamasi itu tercapailah Indonesia merdeka yang susunan negara itu diatur dengan Undang-Undang Dasar 1945 (Sartono Kartodirjo, 1975: 27).

Dengan demikian, hal tersebut merupakan tonggak dari sejarah baru berdirinya negara Republik Indonesia yang terlepas dari segala penjajahan atau segala bentuk ikatan yang timbul dari kolonialisme asing di Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan titik puncak kematangan pemikiran, pengorganisasian dan pencetusan revolusi dari rakyat Indonesia setelah berjuang puluhan tahun dan bahkan ratusan tahun lamanya. Negara yang diproklamasikan kemerdekaannya itu bukanlah merupakan tujuan semata-mata, melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara, yakni: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Padmo Wahyono, 1982: 57).

Setelah kemerdekaan Indonesia, maka bangsa Indonesia bukan lagi berjuang merebut kemerdekaan tetapi untuk mempertahankan dan mengisi kemerdekaan itu dengan pembangunan demi keselamatan rakyat dan negara. Dalam perjalanan sejarah Negara Kesatuan republik Indonesia muncul beberapa ancaman terhadap keutuhan yang berasal dari beberapa gerakan dan peristiwa yang dapat merongrong kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia, salah satunya adalah di Aceh dan sekitarnya.

Di Aceh, berita kemerdekaan baru diketahui secara resmi pada tanggal 20 Agustus 1945. Hal ini disebabkan karena sulitnya komunikasi pada masa itu. Proklamasi kemerdekaan disambut oleh rakyat Aceh dengan gembira sebagai rahmat dari Allah SWT yang telah membebaskan mereka dari belenggu penjajahan. Berita kemerdekaan itu disebarluaskan oleh pemuda-pemuda aceh dengan patriotik dan keberanian yang luar biasa. Seperti menempelkan poster-poster, menghiasi dinding bioskop, tembok-tembok, dan gerbong kereta api. Bendera Merah Putih negara dinaikkan dan berkibar dalam wilayah Aceh yang

menyebabkan kemarahan pasukan Jepang. Bentrok dan insiden terjadi dimana-mana karena Jepang berusaha untuk menurunkan bendera dengan paksa, namun dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam dada rakyat Aceh sudah tidak dapat dibendung lagi.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, peneliti akan mengkaji “Peristiwa Cumbok Sebagai Revolusi Sosial di Aceh Tahun 1945-1946”. Revolusi Sosial adalah suatu revolusi untuk merubah tata cara kehidupan kolonial feodal kepada tata cara kehidupan Nasional (Nasution, 1977).

Penelitian ini hanya akan membahas Peristiwa awal kemerdekaan Republik Indonesia di Aceh, dan timbulnya pertentangan antara Ulama dengan *Ulee Balang*. Anggapan dasar dalam penelitian ini yakni terjadinya peristiwa Cumbok sebagai revolusi sosial di Aceh tahun 1945-1946, dikarenakan kevakuman pemerintahan dari masa penjajahan, proklamasi kemerdekaan dan datangnya Belanda di Indonesia pada umumnya dan pada khususnya di Aceh.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode historis dengan langkah-langkah yakni Heuristik (pengumpulan data) dalam hal ini penulis mengadakan studi pustaka (*Library Research*). Kritik Sumber yang terdiri dari kritik ekstern dan intern. Interpretasi, penulis berusaha menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lain yang mewujudkan suatu peristiwa perjuangan di Aceh, khususnya perjuangan rakyat Aceh dalam peristiwa Cumbok yang mengakibatkan revolusi sosial di Aceh 1945-1946. Historiografi (penulisan), tahap akhir dalam metode penelitian sejarah, penulis berusaha menyajikan hasil penelitian. Laporan disusun secara deskriptif naratif berdasarkan hubungan sebab-akibat dan memperhatikan urutan peristiwa yang terjadi (kronologis).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dilihat dari luas wilayahnya, Aceh mempunyai luas keseluruhan 5.539.000 Ha atau 55.392 Km² dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Fungsi Wilayah di Aceh

No	Keadaan Tanah	Luas (Ha)	Prosentase
1.	Hutan	4.130.000	74,56
2.	Tanah pertanian	233.690	4,22
3.	Tanah perkebunan besar	124.033	2,25
4.	Perkebunan rakyat	182.959	3,30
5.	Perikanan rakyat	16.644	0,30
6.	Padang rumput	432.000	7,80
7.	Danau, Sungai, dll	364.665	6,58
8.	Kota dan Kampung	55.000	6,80

Jumlah	5.539.000	100%
--------	-----------	------

(Sumber: Zakaria Akmad, 1977:1)

Secara administratif pemerintah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam terbagi dalam beberapa kabupaten dan kota seperti tertera didalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. Daerah Administrasi Kota/Kabupaten di Aceh

No	Kota/Kabupaten	Luas (Ha)	Persentase
1.	Kota Sabang	203	0,36%
2.	Kota Banda Aceh	6,106	0,02%
3.	Kabupaten Aceh Besar	302,092	5,47%
4.	Kabupaten Pidie	3,415	6,17%
5.	Kabupaten Aceh Tengah	5,575	10,06%
6.	Kabupaten Aceh Utara	4,755	8,58%
7.	Kabupaten Aceh Timur	7,760	14,01%
8.	Kabupaten Aceh Tenggara	9,635	17,39%
9.	Kabupaten Aceh Barat	12,100	21,85%
10.	Kabupate Aceh Selatan	8,910	1,09%
	Jumlah	55,393	100%

(Sumber: Zakaria Ahmad,1977:4)

Kedudukan *Ulee Balang* adalah kedudukan adat. Para *Ulee Balang* menerima kekuasaan langsung dari Sultan Aceh. Daerah kekuasaan *Ulee Balang* diperintah secara turun-temurun. Namun, sewaktu-waktu akan memangku jabatan pimpinan di daerah, mereka harus disahkan pengangkatannya oleh seorang Sultan Aceh. Disisi lain kedudukan ulama sangat terhormat dan penting karena ulama musuh yang harus dikuasai dan dihancurkan oleh penjajahan Belanda. Ulama dapat menggerakkan semangat juang rakyat dalam mempertahankan daerah Aceh dan sekitarnya. Cumbok adalah nama suatu desa di kecamatan Sakti Kabupaten Pidie Aceh Utara.

Kepala daerah di Cumbok disebut *Ulee Balang* Cumbok dengan bergelarkan Teuku Sari Muda Pahlawan Bintara.

Pimpinan Cumbok dikenal juga dengan sebutan Teuku Daud Cumbok. Karena *Ulee Balang* tidak menghiraukan Ultimatum yang diprakarsai kaum Ulama maka *Ulee Balang* mendapatkan gempuran dan serangan sehingga *Ulee Balang* mengalami kekalahan serta banyak Kaumnya yang tewas dalam peperangan tersebut sedangkan yang masih hidup dipenjarakan dan dieksekusi dan harta bendanya disita. Akibat revolusi Sosial ini membawa dampak yang sangat luas dalam pemerintahan di daerah Aceh.

Situasi yang sudah tidak menentu pasca proklamasi dimanfaatkan para Ulama dan pemuda Aceh dengan mengadakan rapat rahasia untuk menggalang dan menyusun kekuatan guna mengisi dan mempertahankan

kemerdekaan. Selain itu muncul gagasan untuk mengorganisasikan pemerintahan dan pertahanan keamanan secara defenitif. Pada tanggal 3 Oktober 1945, dikeluarkanlah pengumuman oleh Gubernur Sumatera tentang pengangkatan residen Aceh.

Pada waktu itu dibentuklah sebuah lembaga perwakilan daerah yang dinamakan Komite Nasional Daerah dan Badan Eksekutif Daerah yang anggotanya terdiri dari kalangan Komite Nasional Daerah. Untuk pertahanan dan keamanan dibentuklah Angkatan Pemuda Indonesia (API), oleh para Ulama yang memang sudah lama memimpin rakyat dalam perjuangan merebut kemerdekaan.

Pada tanggal 15 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat bersama bahwa perjuangan rakyat Aceh tersebut sebagai Angkatan pemuda Indonesia (API) diseluruh Aceh. Angkatan pemuda Indonesia (API) mempunyai satu markas besar dan empat wakil markas besar, yaitu 1) Markas daerah kedudukan di Kuta raja, Kepala Stafnya adalah Syaman Gahan dan T.A. Hamid Azwa. 2) Wakil markas besar yang terdiri dari empat wilayah yakni Aceh Besar dan Pidie dipimpin oleh Nyah Neh, Aceh Utara dan Tengah dipimpin oleh Teuku Muhammad, Aceh Timur dibawah pimpinan Bastian, Aceh Barat dan Selatan dipimpin oleh Tjut Rahmat. Disamping Angkatan pemuda Indonesia (API) dibentuk pula barisan-barisan Hisbullah yang dipelopori oleh Ulama-ulama terkenal di Aceh,

diantaranya teuku H. Hasan Krueng, Teuku H. Daud Beureuh, BPI (Barisan Pemuda Indonesia), Laskar Mujahidin dibawah pengawasan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).

Tidak ketinggalan para *Ulee Balang* yang terdiri dari kaum bangsawan membentuk organisasi kelaskaran tersendiri yang dimotori oleh Teuku Umar Keumanga, Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Gede Ismail, dkk, (1945: 56): Sementara itu dipihak *Ulee Balang*, Teuku Umar Keumanga Pada tanggal 22 Oktober 1945, mengumumkan agar kaum *Ulee Balang* membentuk tenaga sendiri Yaitu Barisan Penjaga Keamanan (BPK). Sementara itu dalam waktu singkat Barisan Penjaga Keamanan (BPK) ini telah terbentuk dan mempunyai persenjataan lengkap, bahkan lebih sempurna dari persenjataan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kesempurnaan ini dimungkinkan mengalirnya bantuan-bantuan keuangan dari sebagian *Ulee Balang* seluruh Aceh, selain pemberian dari Jepang (Amien, 1978:132).

Akibat perbedaan cara yang ditempuh dalam merebut persenjataan dari tentara Jepang antara *Ulee Balang* dan Ulama sering menimbulkan pertengkaran dan terjadinya konflik bersenjata. Hal ini dimanfaatkan oleh Belanda untuk memecah belah persatuan sesama bangsa Indonesia, dengan mempengaruhi para *Ulee Balang* di daerah Lameulo (Kuta Sakti), yang membentuk *Comite Van Ontvangst*, yaitu

panitia untuk menyambut kedatangan Belanda kembali. Pada masa pendudukan Jepang, kedudukan para *Ulee Balang* ini banyak beralih ketangan kaum Ulama yang tergabung dalam Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA). Untuk merebut kembali keudukannya para *Ulee Balang* membentuk suatu organisasi yang bernama markas *Ulee Balang* dan membentuk tentara dari tiga kelompok, yaitu 1) Barisan Cap Bintang, 2) Barisan Cap Sauh, 3) Barisan Cap Tombak.

Dibawah pimpinan Teuku Daud Cumbok, yang berasal dari Desa Cumbok Kecamatan Kuta Sakti Kabupaten Pidie. Dia seorang yang sangat berani dan lebih menyukai kekerasan (perjuangan fisik) dari pada diplomasi serta memiliki sedikit angkuh. Selama bulan November 1945, Teuku Daud Cumbok menyelenggarakan keramaian dengan perjudiaan dan mabuk-mabukkan.

Pada bulan yang sama tentara-tentara *Ulee Balang* berusaha merebut persenjataan dari tangan Jepang serta melakukan tindakan-tindakan liar diluar batas, seperti perampasan, penangkapan dan pembunuhan terhadap setiap orang yang dicurigai memihak kaum Ulama. Tindakan *Ulee Balang* membangkitkan amarah dan kebencian rakyat Aceh, konflik bersenjata dan pertumpahan darah tidak dapat dihindarkan lagi, sehingga timbulnya Revolusi sosial diseluruh wilayah Aceh. Kaum Ulama bersama rakyat dan barisan-barisan perjuangan rakyat membentuk Markas

Besar Rakyat Umum untuk melawan para *Ulee Balang*. Untuk mencegah konflik dan pertumpahan darah yang meluas, pemerintah daerah memberikan ultimatum sebagai berikut: *Pertama*, Pemerintahan Daerah Aceh menyatakan pasukan-pasukan *Ulee Balang* yang berpusat di Lameulo sebagai penghianat dan musuh Republik Indonesia. *Kedua*, menuntut agar para *Ulee Balang* menyerahkan senjata sebelum tanggal 10 Januari 1945.

Ultimatum tersebut di tolak karena dianggap tidak menguntungkan para *Ulee Balang*. penolakan ultimatum tersebut berakibat bentrokan fisik antara kelompok ulama dan kelompok *Ulee Balang*. Pada bentrokan tersebut banyak *Ulee Balang* yang tewas dan harta bendanya disita. Untuk mengurus harta benda *Ulee Balang* itu maka pemerintah daerah membentuk Majelis yang anggotanya adalah orang-orang PUSA. Dengan kekalahan para *Ulee Balang* di Aceh berarti pula kekalahan Belanda untuk memperoleh dukungan mengembalikan kekuasaan di daerah Aceh.

PENUTUP

Simpulan

Pada bagian akhir penulis akan menyimpulkan secara singkat guna memberikan gambaran secara global dari apa yang telah penulis paparkan sebelumnya.

1. Daerah Aceh adalah daerah bekas Kesultanan Aceh Darussalam, yang menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidupnya. Dan Aceh dikenal dengan sebutan “Serambi Mekkah” karena pemeluk Islam sebelum berangkat Haji ke Mekkah atau setelah pulang dari menunaikan ibadah Haji.
2. Persatuan antara Sultan, *Ulee Balang* dan Ulama serta rakyat merupakan pilar kekuatan Aceh, sehingga penjajah Belanda sulit untuk menguasai Aceh.
3. Politik adu domba dan pecah belah dari penjajah Belanda terhadap *Ulee Balang* dan Ulama, menimbulkan pertentangan dan konflik yang mencapai puncaknya, yaitu revolusi sosial di Cumbok, atau dikenal dengan peristiwa Cumbok.
4. Revolusi yang mencapai tujuan melawan kekuasaan asing dan berusaha agar bangsa Indonesia dapat menduduki jabatan dalam pemerintahan.
2. Kelemahan dan kekalahan bangsa Indonesia karena mudahnya dipecah-belah menjadi berkelompok-kelompok, sehingga sangat mudah bagi Belanda untuk mengadu domba dan mengambil keuntungan dari pertikaian sesama saudara kita sendiri. Pertikaian yang berujung melemahnya kekuatan bangsa sendiri.
3. Kesadaran dan kemauan belajar dari peristiwa Cumbok ini sangat diperlukan bagi semua rakyat Indonesia, khususnya rakyat Aceh agar jangan sampai terjerumus kedalam nostalgia sejarah tetapi justru harus menjadi pembuat atau pelaku sejarah bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Zakaria. 1977. *Monografi Aceh*. Proyek RPM Sumbar: Padang.
- Amin. S.M. 1978. *Kenang-kenangan dari masa lampau*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- Kartodiharjo, Sartono. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jilid III. Depdikbud: Jakarta.
- Muhammad Gade Ismail. 1994. *Kasus Darul Islam di Aceh*. Depdikbud: Jakarta.
- Nasution, A.H. 1977. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Wahyono, Padmo. 1982. *Negara Republik Indonesia*. Jakarta: CV. Rajawali.

Saran

Dengan terjadinya peristiwa Cumbok, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Sejarah berdirinya Aceh dan perang mempertahankan daerah Aceh dari penjajahan Belanda hendaknya, dapat dijadikan pelajaran dan contoh teladan dalam hal ini keberanian rakyat Aceh.

